



BACK TO THE OFFICE REPORT

- ❑ **PERTEMUAN DENGAN:** Koordinator Penanganan Pengaduan Komnas HAM-Informal
- ❑ **TANGGAL:** 20 Sept 2023
- ❑ **WAKTU:** 11.00 WIB – selesai
- ❑ **LOKASI:** Anomali Coffee, Menteng & Komnas HAM
- ❑ **PARTISIPAN:** Nala & Hilman (Auriga), Endang Sri Melani (Komnas HAM)

AGENDA

1. Update dan feeding informasi terkait Inisiatif Pembuatan Panduan Pemeriksaan Pembela Lingkungan di Kepolisian.
 - Pertemuan terakhir, 25 Juli 2023 Auriga dengan Ketua Komnas HAM dan menerima beberapa masukan mekanisme yang harus ditempuh Auriga agar Komnas HAM dapat menindaklanjutinya dan mengarah ke MoU bila memang diperlukan.
2. Auriga membutuhkan Komnas HAM untuk memberikan masukan teknis dan substantif. Termasuk sharing data antara Auriga dan Komnas HAM.
3. Bagaimana mekanisme dan proses yang bisa ditempuh Auriga untuk merangkul partisipasi Komnas HAM. Sharing information.
 - Ke pihak Komnas HAM, bila Auriga hanya membutuhkan masukan. Melalui Pak Saurlin cepat. Namun bila butuh legalitas dalam hal ini berbentuk MoU. Maka butuh waktu yang panjang. Karena untuk memutuskan kasus/inisiatif yang akan didukung/dorong Komnas HAM ditempuh melalui proses Rapat Paripurna Komisioner. Jadwal terdekat Rapat Paripurna minggu kedua Oktober 2023.
 - Ke pihak Polri, idealnya inisiatif ini didorong ke Divisi Hukum. Karena di sana ada bagian pembinaan dan pengkajian. Inisiatif ini baiknya dibangun dengan riset isu lingkungan dan menguatkan para stakeholders. Dengan memberikan manfaat kepada semua pihak. Baru kemudian didorong untuk membuat komitmen.
 - Kalau fase itu sudah kuat. Baru mengalir ke arah isu human rights defenders. Jangan dibalik.

Terkait Anti-SLAPP

- Mekanisme Anti SLAPP semakin diperlukan untuk melindungi masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pemerintahan untuk kepentingan publik, namun pasal 66 UU PPLH dan SK KMA 36/2013 belum cukup memberi perlindungan tersebut.
- Rancangan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tentang perlindungan pembela HAM atas lingkungan menjadi inisiatif baik yang perlu diperkuat dalam upaya perlindungan pembela HAM dari SLAPP. Lebih lengkap mengenai penguatan mekanisme Anti-SLAPP simak kertas kebijakan berikut:
- <https://icel.or.id/kertas-kebijakan/urgensi-peraturan-anti-slapp-di-indonesia-pembelajaran-dari-beberapa-negara/>
- <https://icel.or.id/kertas-kebijakan/mekanisme-anti-slapp-dalam-pembaruan-hukum-acara-pidana/>
- Diskusi lebih jauh mengenai ANTI SLAPP bisa hubungi Franky (Unair) +62 822-4701-0700



Lainnya:

- Untuk memperkaya kajian Auriga bisa melihat dan merujuk pada Maastricht Guideline, sebuah panduan untuk melihat kasus-kasus pelanggaran Hak EKOSOB, termasuk khususnya aspek lingkungan. http://hrlibrary.umn.edu/instree/Maastrichtguidelines_.html

TO DO LIST

- Auriga perlu kembali meyakinkan Komnas HAM bahwa inisiatif ini penting dengan memaparkan tiga poin pertimbangan utama berikut: Bahwa Auriga memiliki data yang kuat terkait kasus pembela lingkungan; Inisiatif ini memberikan benefit nyata kepada pembela lingkungan; Inisiatif ini juga memberikan benefit kepada Komnas HAM.
- Poin-poin tersebut menjadi pertimbangan utama dalam rapat paripurna Dewan Komisioner Komnas HAM untuk menentukan apakah kegiatan tersebut akan didukung melalui MoU. Proses pengambilan keputusan ini dipengaruhi banyak komponen di masing-masing komisioner yang berjumlah 9 orang tersebut.
- Auriga mengajukan permintaan data pengaduan ke Komnas HAM melalui website. Notif ini langsung masuk ke Biro Penanganan Pengaduan (Mel) dan dapat langsung direspon.
- Auriga menghubungi Pak Saurlin untuk mendapat masukan teknis dan substantif terkait inisiatif.
- Auriga disarankan perlu membuat FGD dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk membentuk kesolidan dan pemahaman yang serupa terkait inisiatif ini.